SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 51-57

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DINASTI UMAYYAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Zalza Rapika Fuji Ayu[1], Anisa Nurul Hidayanti[2], Sugih Patoni[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universtas Siliwangi

zalzarapikafujiayu3@gmail.com .

Keyword:
Fiscal policy; Umayyad dynasty; social welfare; Islamic economics.

Abstract

This study aims to analyze the fiscal policy implemented during the Umayyad Dynasty and its implications for social welfare from the perspective of Islamic economics. Using a qualitative approach with a normative-historical method, this research examines classical and contemporary literature related to Islamic public finance. The findings indicate that the fiscal structure of the Umayyad Dynasty relied on instruments such as kharaj, jizyah, zakat, and fai', managed through Bayt al-Mal. Fiscal reforms, particularly during the reign of Umar ibn Abd al-Aziz, significantly improved income distribution and reduced social inequality. The study concludes that justice-oriented fiscal policy plays a crucial role in achieving social welfare and remains relevant for contemporary Islamic public finance systems.

Kata Kunci:
Kebijakan fiskal; Dinasti Umayyah; kesejahteraan sosial; ekonomi Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa Dinasti Umayyah serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-normatif melalui studi literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fiskal Dinasti Umayyah bertumpu pada instrumen kharaj, jizyah, zakat, dan fai' yang dikelola melalui Bayt al-Mal. Reformasi fiskal, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berkontribusi signifikan terhadap distribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan distributif memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan relevan untuk sistem keuangan publik Islam kontemporer.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan fungsi stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi semata, Islam memandang kebijakan fiskal sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah)[1].Negara memiliki peran sentral dalam memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil serta mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7).

Sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa sistem fiskal telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Namun, pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), sistem tersebut mengalami transformasi signifikan seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas, mencakup Syam, Afrika Utara, Persia, hingga Andalusia[2]. Ekspansi ini membawa implikasi terhadap kebutuhan pembiayaan negara yang semakin kompleks, baik dalam bidang administrasi, pertahanan, maupun pembangunan infrastruktur.

Pada masa awal Umayyah, sumber pendapatan negara berasal dari kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), zakat, dan ghanimah[3].Struktur fiskal ini menunjukkan adanya kombinasi antara instrumen religius dan administratif. Namun dalam praktiknya, dinamika sosial-politik memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pada periode tertentu, muncul kecenderungan sentralisasi kekayaan di kalangan elite politik yang menimbulkan ketimpangan sosial[4].

Reformasi besar terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang melakukan koreksi terhadap praktik fiskal sebelumnya. Ia menghapus diskriminasi terhadap kaum mawali, mengoptimalkan distribusi zakat, serta memperkuat fungsi Bayt al-Mal sebagai lembaga pengelola keuangan publik[5].Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ekonomi modern yang masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi kekayaan dan kemiskinan struktural, kajian terhadap kebijakan fiskal Dinasti Umayyah menjadi relevan[6].Studi historis ini tidak hanya penting untuk memahami praktik keuangan

[1] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 211.
[2] Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 79.
[3] Philip K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan, 2002), 195.
[4] Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Bandung: Mizan, 1996), 145.
[5] Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar bin Abdul Aziz (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 312.
[6] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 245.

publik Islam klasik, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai normatif yang dapat diterapkan dalam sistem fiskal kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena objek kajian bersifat historis-konseptual, yaitu kebijakan fiskal pada masa Dinasti Umayyah. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa literatur sejarah Islam klasik, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta referensi akademik yang relevan dengan topik kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Persfektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang berlandaskan nilai keadilan dan keseimbangan[7]. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi, sementara kharaj dan jizyah menjadi sumber pendapatan negara untuk pembiayaan publik. Prinsip maqashid al-shariah menjadi kerangka normatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Dari ini lanjutkan nya

Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal Islam menegaskan peran negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Negara tidak hanya berperan sebagai pengumpul pendapatan, tetapi juga sebagai pengelola yang memastikan anggaran negara dialokasikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran negara harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah[8]

Selain itu, fungsi distribusi menjadi ciri khas utama kebijakan fiskal Islam. Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan. Instrumen zakat, misalnya, secara sistematis mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada golongan mustahik. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas ekonomi[9].

Sementara itu, fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal Islam berkaitan dengan upaya

[7] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 173.
[8] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 211.
[9] Monzer Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System (Plainfield: Muslim Students Association of the United States and Canada, 1978), 67.

menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah terjadinya krisis yang merugikan masyarakat. Negara dapat melakukan pengaturan terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Dengan berlandaskan pada prinsip maqashid al-shariah, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga melindungi harta (hifz al-mal) dan menjamin kesejahteraan sosial secara menyeluruh[10].

2. Struktur dan Dinamika Fiskal Dinasti Umayyah

Struktur fiskal Dinasti Umayyah berkembang seiring dengan transformasi sistem pemerintahan Islam dari model sederhana pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi administrasi negara yang lebih kompleks. Perluasan wilayah yang sangat luas menuntut adanya sistem keuangan publik yang terorganisasi dan efisien. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dibentuk lembaga diwan sebagai institusi administratif yang mengatur pencatatan pendapatan dan pengeluaran negara[11]. Reformasi ini menunjukkan adanya profesionalisasi tata kelola fiskal untuk menopang stabilitas pemerintahan dan kebutuhan pembiayaan negara.

Sumber utama pendapatan negara pada masa Umayyah meliputi kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), zakat, serta fai' dan ghanimah. Kharaj menjadi tulang punggung penerimaan negara terutama dari wilayah pertanian produktif seperti Irak dan Mesir[12]. Sistem ini memungkinkan negara memperoleh pendapatan tetap tanpa harus mengubah struktur kepemilikan tanah secara drastis. Sementara itu, jizyah diterapkan kepada warga non-Muslim sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan negara dan pembebasan dari kewajiban militer.

Namun, dinamika sosial-politik turut memengaruhi kebijakan fiskal tersebut. Dalam praktiknya, pada beberapa periode terjadi ketimpangan perlakuan antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab (mawali), terutama dalam penerapan pajak. Beberapa penguasa tetap membebankan jizyah kepada mawali meskipun mereka telah memeluk Islam, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan kritik terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil[13].Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap legitimasi politik dan stabilitas sosial.

Reformasi signifikan terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M). Ia

[10] Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.
[11] Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 82.
[12] Philip K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan, 2002), 195.
[13] Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Bandung: Mizan, 1996), 152.

menghapus praktik diskriminatif dalam sistem perpajakan, mengembalikan fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Bayt al-Mal[14]. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan distribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan di beberapa wilayah. Dinamika ini menunjukkan bahwa struktur fiskal Dinasti Umayyah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh visi kepemimpinan dan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam Islam.

3. Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal Dinasti Umayyah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan terciptanya keadilan distribusi. Reformasi fiskal yang dilakukan, khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, menunjukkan bagaimana kebijakan keuangan publik dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat[15].

Optimalisasi pengelolaan zakat dan perbaikan sistem distribusi melalui Bayt al-Mal berdampak pada peningkatan daya beli kelompok masyarakat miskin. Dana zakat dan penerimaan negara lainnya digunakan untuk membantu fakir miskin, membebaskan utang, serta mendukung kebutuhan sosial masyarakat. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa fiskal dalam Islam memiliki orientasi yang kuat pada perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan ekonomi umat[16].

Selain itu, kebijakan penghapusan diskriminasi pajak terhadap kaum mawali turut memperkuat integrasi sosial dan stabilitas politik. Ketika perlakuan fiskal dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang etnis atau status sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Hal ini berdampak positif terhadap kohesi sosial dan memperkecil potensi konflik ekonomi berbasis identitas[17].Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat legitimasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, pengalaman Dinasti Umayyah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip keadilan dan maqashid al-shariah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial. Perlindungan harta (hifz al-mal) dan distribusi yang adil menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang lebih seimbang dan

[14] Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar bin Abdul Aziz (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 312.
[15] Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar bin Abdul Aziz (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 329.
[16] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 245.
[17] Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 84.

stabil[18].Model ini memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada nilai etis dan tanggung jawab sosial memiliki relevansi kuat bagi sistem keuangan publik kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem konvensional karena berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal Islam tidak hanya bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Prinsip maqashid al-shariah menjadi fondasi normatif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan fiskal agar selaras dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan keadilan sosial.

Struktur dan dinamika fiskal Dinasti Umayyah menunjukkan adanya transformasi sistem keuangan publik Islam menuju administrasi yang lebih terorganisasi dan profesional. Pembentukan lembaga diwan, optimalisasi penerimaan dari kharaj, jizyah, zakat, serta pengelolaan Bayt al-Mal mencerminkan upaya sistematis dalam mengelola keuangan negara. Meskipun pada beberapa periode terjadi ketimpangan dalam implementasinya, reformasi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan mampu memperbaiki distribusi kekayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Implikasi kebijakan fiskal Dinasti Umayyah terhadap kesejahteraan sosial terlihat dari peningkatan distribusi pendapatan, perlindungan terhadap masyarakat miskin, serta penguatan integrasi sosial. Optimalisasi zakat dan penghapusan diskriminasi fiskal terhadap kaum mawali menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, pengalaman historis Dinasti Umayyah memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai etika dan tanggung jawab sosial memiliki relevansi kuat bagi pengembangan sistem keuangan publik Islam kontemporer dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

[18] Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8.

REFERENSI

Al-Nawawi, I. (2020). *At-Tibyân fî Âdâb Hamalatil Qur'ân linnawawî*.

C., C. (1971). International Journal of Middle East Studies. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, *14*(1), 106. https://doi.org/10.2307/3596012

Chapra, M. U. (1984). Book Review: The Islamic Economy: An Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. *Comparative Political Economy: Comparative Capitalism EJournal*, *null*(2), null. https://www.semanticscholar.org/paper/36a701e8be50e4c65a5521d76dc62c6df7ba91b5

Djalaludin, M. M. (2015). Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t. *Ad-Daulah*, *4*(2), 289–300.

Hamzah, S., & Kurais. (2024). Khilafah Dan Kerajaan Dalam Perspektif Abu a'La Al-Maududi (Analisis Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *10*(2), 51–66. https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i2.212

Harvard Islamic Finance Innformation Program. (1998). *Proceedings of theSecond Harvard University Forum on Islamic Finance*.

Khan, M. S. (1992). Islam and The Economic System. In *Review of Islamic Economics* (Vol. 2, Issue 1).

Morony, M. G., & Lapidus, I. M. (1990). A History of Islamic Societies. *Journal of the American Oriental Society*, *110*(2), 365. https://doi.org/10.2307/604559

Skinner, J. (1938). History of the Arabs . Philip K. Hitti . In *Speculum* (Vol. 13, Issue 1, pp. 106–107). https://doi.org/10.2307/2848838